



## Peran AUPB dalam Melindungi Integritas Pegawai KPK: Tinjauan Yuridis atas Kasus Pemecatan yang Dipertanyakan

Dimas Haryo Pamungkas<sup>1</sup>, Gidion Nelson Manulang<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Received: 12 April 2023

Revised: 23 April 2023

Accepted: 23 Mei 2023

### Abstract

*Dalam hal ini terdapat problematika dimana terjadi kasus pemecatan pegawai yang semena-mena sehingga patut dipertanyakan mengenai kasus pemecatan pegawai KPK. Dalam hal ini integritas pegawai KPK yang seharusnya sebagai lembaga yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dari kasus pemecatan tersebut. Selain itu, tinjauan yuridis dalam melindungi integritas seorang pegawai harus memiliki fitas yang integritas sesuai dengan peranan dalam asas umum pemerintahan yang baik. Peran masyarakat dan dewan pengawas KPK dalam menangani pemecatan sebagai penyeimbang atas KPK yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Hal tersebut akan dapat menjadi dampak negative apabila masalah tersebut tidak ditindak dan diluruskan. Kemudian, membenarkan budaya hukum yang berkeadilan dapat menjadi pemerintahan sesuai dengan reformasi birokrasi. Peranan hukum dalam memperbaiki penyelenggaraan lembaga pemerintahan yang adil atas terjadinya praktek mal administrasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk yang melanggar aturan administrasi sebagai wujud reformasi birokrasi.*

**Keywords:** Penegakan Hukum, Maladministrasi, Reformasi Birokrasi

(\*) Corresponding Author: [dimasharyop12@gmail.com](mailto:dimasharyop12@gmail.com)

**How to Cite:** Pamungkas D.M., & Manulang G.N. (2023). Peran AUPB dalam Melindungi Integritas Pegawai KPK: Tinjauan Yuridis atas Kasus Pemecatan yang Dipertanyakan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097842>

## PENDAHULUAN

Penegakan Hukum mengacu pada aturan hidup manusia yang diperlukan dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, namun terkadang diabaikan oleh sebagian orang. Tidak jarang fungsi hukum dilanggar, dilanggar, bahkan dimanipulasi oleh orang-orang yang berkepentingan, atau yang masih percaya akan pentingnya suatu hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Proses upaya menegakkan atau memfungsikan secara nyata norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan lintas atau hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum pada lembaga pemerintah hanya untuk masyarakat yang

<sup>1</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapir: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.



menegah ke atas yang menjadi prioritas Sehingga, dapat dikatakan dalam pengelolaan negara, yang disebut pelaku tidak hanya dijalankan oleh pemerintah saja melainkan badan swasta dan masyarakat sipil .<sup>2</sup>sedangkan masyarakat menegah kebawah sering dipandnag sebelah mata sehingga penyelenggaraan pemerintah sering menjadi problematika atas terjadinya mal administrasi sangat sulit untuk ditangani. Dalam hal ini, dibutuhkan keberanian masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas pemerintah untuk melakukan terobosan dalam penyelesaian kasus.Namun, para p enegak hukum yang pada realitasnya masih tidak melaksanakan tugasnya secara optimal menjadi bukti bahwasanya mentalistas penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah. Tercapainya penegakan hukum yang baik menjadi salah satu indikator apakah tata pemerintahan sudah baik atau mencapai (Good Governance). Sebagai wujud reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya yang dilakukan dalam memperbaiki tatanan birokrasi untuk menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi mulai ada di Indonesia sejak masa orde baru.adanya reformasi birokrasi pada saat itu karena maraknya mal administrasi. ,Reformasi Birokrasi merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan melaksanakan reformasi dan pembenahan mendasar system penyelenggaraan pemerintahan adalah reformasi birokrasi, yang menitikberatkan pada struktur organisasi (organisasi) lembaga, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Sejak banggunya kembali pemerintahan hingga beberapa periode berikutnya terlampaui jauh dari harapan dan belum mewujudkan reformasi birokrasi yang optimal. Permasalahan dapat kita lihat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dimana disitu sudah tertanam kuat bahwasanya birokrasi merupakan perpanjangan kata dari lambat, rumit, memperlambat pengembangan, mengutamakan prosedur di atas konten, serta tidak efektif.

Reformasi memang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun, namun tidak jelas maksud dari karakteristik dan pola komunikasi pemerintah. Dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan, banyak

---

<sup>2</sup> Akadun, "Good Governance" dalam jurnal Sosiohumaniora Vol. 9, No. 1, Tahun 2007, hal. 40

lembaga negara yang masih terjebak dalam pelembagaan kewenangan aparatur pemerintah. Tidak diragukan lagi, lembaga-lembaga di bawah kendali pemerintah terus menekan mengungguli kekuasaan. Komunikasi yang lumrah di antara kelas dominan yang berkuasa diperlukan untuk melestarikan komunikasi otoriter. Tidak ada wacana paksa yang digunakan demi menciptakan makna Bersama yang kemudian dikemas dalam kerangka formalistik dan disepakati oleh kedua belah pihak, mengangkat interaksi antara pemerintah dan masyarakat di atas berbagai kepentingan yang berdampak padanya. Namun hal lain yang juga terjadi adalah terjadinya ketimpangan kekuasaan yang terus-menerus antara mereka yang terlibat dalam politik di pemerintahan.

Melihat kondisi tersebut, perlunya motivasi terhadap reformasi birokrasi oleh pimpinan organisasi pemerintahan yang dapat membina komunikasi yang terintegrasi dengan masyarakat sebagai entitas yang harus dilayani. Hal ini didasarkan pada demokratisasi komunikasi serta niat untuk memberikan layanan kepada publik yang lebih baik

### **Pembahasan**

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah seperangkat prinsip-prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, Efektivitas dan efisiensi, Partisipasi masyarakat, Keadilan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, adil, serta bebas dari korupsi dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ada masalah yang sering dihadapi dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang sering disebut sebagai "mal administrasi"

Dalam konteks asas-asas umum pemerintahan yang baik, "mal administrasi" mengacu pada praktik-praktik administrasi yang tidak memenuhi standar yang diharapkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa

contoh mal administrasi dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik termasuk tindakan korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, tindakan diskriminatif, serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan bertindak secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, adil, serta bebas dari korupsi dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mal administrasi harus dihindari dan diperbaiki secepat mungkin jika terjadi. Jika terjadi mal administrasi, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki dan mencegahnya terjadi lagi di masa depan. cara yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah mal administrasi dalam sistem pemerintahan kita adalah transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat demi meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengatasi mal administrasi<sup>3</sup>

Transparansi pemerintah adalah suatu prinsip di mana pemerintah secara terbuka dan jujur memberikan akses kepada publik terhadap informasi mengenai tindakan dan kebijakan yang mereka buat dan implementasikan. Transparansi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencegah mal administrasi karena dapat Meningkatkan akuntabilitas Transparansi pemerintah memungkinkan publik untuk mengawasi dan memeriksa tindakan pemerintah. Hal ini membuat pemerintah lebih bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan adanya transparansi, pemerintah harus menjelaskan keputusan mereka dan tindakan yang mereka ambil. Ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar atau tidak etis. Selain itu Meningkatkan keterbukaan Transparansi juga dapat meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan yang transparan, publik diberikan akses kepada informasi penting seperti rencana kebijakan, laporan keuangan, dan data statistik. Ini dapat membantu mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis atau korupsi dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi pemerintah juga dapat memperkuat partisipasi publik dalam proses kebijakan publik. Dengan memungkinkan publik untuk mengakses

---

<sup>3</sup> Muslimah . “mal administrasi dalam Tindakan pemerintah” (2021) : 2

informasi dan memberikan masukan, pemerintah dapat mengetahui pandangan dan kepentingan publik yang beragam. Hal ini dapat membantu mencegah kebijakan yang tidak berpihak atau berdampak negatif pada masyarakat. Mendorong pengawasan publik Transparansi pemerintah dapat mendorong pengawasan publik. Publik dapat memeriksa dan mengawasi tindakan pemerintah, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah terjadinya tindakan yang tidak benar atau korupsi. Hal ini juga dapat membantu menciptakan tata kelola yang lebih baik dan membuat pemerintah lebih efisien dalam mengelola sumber daya publik.<sup>4</sup>

Partisipasi masyarakat dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengatasi masalah maladministrasi.

Berikut beberapa cara partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengatasi maladministrasi:

- Mendorong transparansi: partisipasi masyarakat dapat mendorong transparansi dalam pemerintahan dan mencegah terjadinya maladministrasi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan meminta dan memperoleh informasi publik dari pemerintah. Dalam hal ini, transparansi pemerintah sangat penting untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Masyarakat dapat meminta informasi publik melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam meminta informasi publik dapat mendorong transparansi pemerintah dan mengurangi terjadinya maladministrasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah juga dapat mendorong transparansi. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengawasan, misalnya dengan membentuk forum atau lembaga pengawas yang independen, yang bertujuan untuk mengawasi kinerja

---

<sup>4</sup> Muslimah . “mal administrasi dalam Tindakan pemerintah” (2021) : 2Hafiez, afrizal . “peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah” (2021) : 5

pemerintah dan memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan program dan kebijakan publik.

- Memberikan umpan balik (feedback): Ketika masyarakat memberikan umpan balik atau feedback terkait pelayanan publik, hal ini dapat mendorong transparansi pemerintah dalam menghindari maladministrasi. Feedback dari masyarakat dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang kekurangan atau masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan dan memperbaiki kinerjanya. Selain itu, umpan balik dari masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, sehingga tercipta keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam memberikan umpan balik dapat menjadi pengawas bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pemerintah akan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat menimbulkan maladministrasi karena adanya peran serta masyarakat yang kritis dan terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik dapat mendorong transparansi pemerintah dalam menghindari maladministrasi, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. untuk memperbaiki tindakan pemerintah dalam mengatasi maladministrasi.
- Mendorong akuntabilitas: Masyarakat yang aktif dan terlibat dalam proses pemerintahan dapat mendorong akuntabilitas pemerintah dan pada gilirannya mendorong transparansi demi menghindari maladministrasi. Ketika masyarakat memonitor kinerja pemerintah dan mengajukan pertanyaan atau permintaan informasi, pemerintah harus memberikan jawaban yang akurat dan transparan tentang kebijakan dan program yang dilaksanakan. Hal ini akan membantu menciptakan rasa percaya antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, pemerintah akan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat menimbulkan maladministrasi. Selain itu, ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, mereka dapat

memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat. Mendorong akuntabilitas pemerintah juga dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah, maka pemerintah akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintah dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta menghindari terjadinya maladministrasi dan korupsi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan dan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi publik.

- **Membangun kesadaran masyarakat:** Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dalam pemerintahan dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya mal administrasi. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-haknya untuk memperoleh informasi publik dan bagaimana pemerintah seharusnya melakukan tugasnya secara transparan, maka masyarakat akan lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah juga diharapkan dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyediakan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara. Melalui kesadaran yang tinggi, masyarakat juga dapat membantu mempercepat pengungkapan tindak mal administrasi yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan setiap tindak mal administrasi yang mereka temukan kepada pihak yang berwenang seperti Ombudsman atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran penting sebagai pelapor yang akan memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab dan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima.

Efektivitas implementasi asas-asas umum pemerintahan sangat penting dalam mencegah terjadinya mal administrasi. efektivitas implementasi asas-asas umum pemerintahan juga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, maka proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam administrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah<sup>5</sup>. Ke efektifkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di pengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu:

- Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur merupakan prinsip fundamental dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika aturan dan prosedur diikuti dengan benar, maka akan memastikan bahwa kegiatan pemerintah dilaksanakan secara konsisten dan transparan, serta dapat meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, dan efisiensi pemerintah. Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur akan memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia secara terbuka dan mudah diakses. Hal ini akan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi. Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dengan memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah didasarkan pada aturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur akan memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat menjadi fokus utama dari tindakan pemerintah. Dengan memastikan bahwa prosedur yang berlaku diikuti dengan benar, maka masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebutuhan mereka akan lebih terpenuhi. Terakhir, kepatuhan terhadap aturan dan prosedur akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan dengan cara yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa aturan dan prosedur yang diterapkan benar-benar sesuai dengan tujuan

---

<sup>5</sup> Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 4, No. 1 (2020) - "Efektivitas Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia"

yang diinginkan dan mengikuti prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan prosedur terjaga dan dipatuhi oleh seluruh pihak terkait.

- **Transparansi** merupakan prinsip dasar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi terkait kebijakan dan tindakan pemerintah mudah diakses dan tersedia untuk masyarakat. Dengan transparansi, tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diperiksa oleh masyarakat. Dalam hal ini, transparansi dapat memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya. Transparansi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya akses terbuka terhadap informasi, masyarakat dapat memberikan masukan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pemerintah. Transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat merasa bahwa pemerintah terbuka dan jujur dalam kebijakan dan tindakannya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi praktik transparansi dalam semua kegiatan dan kebijakan yang dilakukan. Praktik transparansi ini dapat diwujudkan melalui penerapan kebijakan informasi publik, penggunaan teknologi informasi, serta membangun sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.
- **Akuntabilitas** merupakan prinsip dasar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya. Dalam hal ini, akuntabilitas dapat mendorong kebijakan yang tepat. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah cenderung untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran karena mereka tahu bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Akuntabilitas dapat memperkuat keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Akuntabilitas juga berperan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah dan tindakan yang dilakukan. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang transparan dan efektif, masyarakat merasa bahwa pemerintah benar-benar bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah diharuskan untuk melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja mereka secara berkala. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tindakan pemerintah karena mereka harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya dan keputusan yang diambil. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif, menerapkan audit keuangan yang independen, dan memastikan adanya mekanisme pengaduan publik yang efektif. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil dan dapat meningkatkan efektivitas implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Keterlibatan masyarakat adalah salah satu prinsip dasar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi asas-asas tersebut. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dengan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan umpan balik pada kinerja mereka. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pemerintah diharuskan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat keterbukaan dan transparansi dalam tindakan pemerintah dengan memberikan akses informasi publik dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memantau tindakan pemerintah dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Keterlibatan masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penggunaan sumber daya yang efektif dengan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, penting bagi pemerintah untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dan memberikan akses informasi publik yang transparan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan efektivitas implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Mal administrasi memiliki dampak yang buruk dan berkepanjangan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dampak negatif dari mal administrasi atau administrasi yang buruk bagi kehidupan masyarakat dan negara antara lain adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan dan diskriminasi, tidak efektifnya kebijakan dan program, merusak citra pemerintah dan negara, serta menurunkan kualitas pelayanan publik.<sup>6</sup> Hal ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan, menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di masyarakat, serta menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mal administrasi atau administrasi yang buruk dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan negara, antara lain:

- Korupsi dan penyalahgunaan wewenang: Mal administrasi seringkali menjadi penyebab terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara dan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan institusi publik.
- Ketidakadilan dan diskriminasi: Mal administrasi dapat memunculkan praktik-praktik diskriminatif atau tidak adil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di masyarakat, serta merugikan kelompok-kelompok yang lebih lemah.
- Tidak efektifnya kebijakan dan program: Mal administrasi dapat menyebabkan tidak efektifnya kebijakan dan program pemerintah, sehingga tidak mencapai

---

<sup>6</sup> Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2 (2020) - "Dampak Buruk Maladministrasi Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia"

sasarannya atau bahkan berdampak negatif pada masyarakat. Hal ini dapat memperburuk masalah sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.

- Merusak citra pemerintah dan negara: Mal administrasi dapat merusak citra pemerintah dan negara di mata masyarakat, nasional maupun internasional. Hal ini dapat menghambat investasi dan perdagangan, serta menurunkan daya saing negara di arena internasional.<sup>7</sup>
- Menurunkan kualitas pelayanan publik: Mal administrasi dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hal ini dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat serta menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik guna mengurangi dampak negatif dari mal administrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dari dampak buruk tersebut, keberadaan lembaga pengawas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi peranan lembaga pemerintah. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya praktik maladministrasi yang menjadi suatu permasalahan yang dapat merugikan masyarakat. Ombudsman sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bertugas untuk mendorong perbaikan kualitas peranan lembaga pemerintah sebagai wujud reformasi birokrasi agar lebih efektif dan efisien dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Ombudsman sebagai lembaga pengawas memiliki tugas lain tidak hanya ranah penyelesaian administrasi yaitu sebagai penghubung masyarakat aduan dan laporan masyarakat melainkan dalam pencegahan mal administrasi agar masyarakat dapat memperoleh keadilan, aman dan kesejahteraan dalam

---

<sup>7</sup> Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 23, No. 4 (2019) - "Maladministrasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Dampaknya Terhadap Citra Negara di Indonesia"

<sup>8</sup> Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3.

pelayanan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia di tingkat daerah bertujuan mendekatkan pelayanan Ombudsman kepada masyarakat luas. Peran pokok Ombudsman adalah menangani keluhan masyarakat, menyangkut keputusan atau Tindakan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, melindungi orang dari pelanggaran hak, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, pengabaian, keputusan yang tidak adil dan kesalahan administratif. Peranan Ombudsman ini diarahkan agar kinerja administrasi pemerintahan di level pusat maupun daerah dapat diperbaiki dan ditingkatkan, tindakantindakan pemerintah dapat lebih terbuka dan pemerintah dengan birokrasinya bisa lebih akuntabel terhadap masyarakat luas. Selain itu, Ombudsman mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara obyektif atas keluhan masyarakat umum mengenai pelayanan umum dan administrasi pemerintahan, dan dapat juga atas inisiatif sendiri melakukan penyelidikan, sekaligus mendaftarkan keluhan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan tugas memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya serta wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak dan mempermudah Pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam memeriksa Laporan tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar Penyelenggara

---

<sup>9</sup> Indriastuti, I. (2020). Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 10(1), 60-75

<sup>10</sup> Ghozali Puruhito. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik. *Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. hal. 3-4. (Lihat Prasetyo, Eko dkk. Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2003. hlm. 18).

Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>11</sup>

Sanksi hukum administrasi merupakan suatu sanksi yang implemantasinya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).<sup>12</sup>

Untuk membangun budaya hukum pelayanan publik yang mencirikan praktek good governance, terdapat banyak aspek yang harus dibenahi dalam birokrasi publik, sehingga pelayanan public yang prima dapat diwujudkan, terutama perubahan mindset, yang selama ini menjadi penyebab pelayanan publik yang buruk. Selanjutnya dengan langkah kongkrit pendelegasian kewenangan dan mengembalikan pelayanan publik kepada “khittah” konstitusi, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tidak melenceng dari tujuan mulia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik, menempatkan aparatur pemerintah sebagai pelaku yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan. Dan untuk tujuan kelancaran pemberian pelayanan publik tersebut, sosialisasi seringkali dilakukan oleh pejabat-pejabat, aparat pemerintah yang bertujuan tak hanya sekedar mengabarkan hukum-hukum baru kepada masyarakat. Melainkan lebih jauh daripada itu, kaidah-kaidah baru itu penting tidak cuma agar diketahui melainkan juga mesti diperhatikan agar seseorang tidak mengalami kesulitan di tengah kehidupan bernegara yang diupayakan tertib pada tataran nasional.

---

<sup>11</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetaka Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 183.

## **Simpulan**

Berdasarkan pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penegak hukum perlu diterapkan dalam dengan adanya peran pengawas dsan peran masyarakat dapat menjadi bentuk penyeimbng sehingga penegak hukum tetap dapat diterapkan dan perana pemerintah dalam pelayanan publik menjadi efektif dan efesian serta transparan dsesuai dengan asas pemerintahan yang baik.dengan adanya suatu budaya hukum pada lembaga menjadikan tatanan pengeloayaan pemebarintahan yang berkeadilan sebagai wujud reformasi birokrasi.

Adanya Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan upaya yan dilakukan dalam memperbaiki tatanan birokrasi untuk menjadi lebih tranparan .Reformasi birokrasi mulai ada di Indonesia sejak masa orde baru.adanya reformasi birokrasi pada saat itu karena maraknya kasus mal adminitrasi kurangnya kualitas pelayanan publik, kurangnya efisiensi, dan efektivitas dari birokrasi pemerintah, masih kurangnya transparansi birokras pemerintahan dan kurangnya tingkat disiplin dan etos kerja pegawai serta budaya hukum yang diterapkan sehari – hari.. Tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam reformas birokrasi dapat terlihat dengan proses administrasi yang terbilang lambat beberapa dearah, kemampuan aparatur sipil negara yang kurang kompeten dan melakukan banyak kecurangan, dan sistem birokrasi yang antara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau bahkan terlalu berpatok pada sistemnya sehingga keefektivannya tidak dapat dirasakan oleh siapa pun. sebagian masyarakat awam menggambarkan birokrasi sebagai sesuatu yang rumit, tidak merakyat, butuh banyak biaya dan profesionalisme,yang mengesampingkan rasa kemanusiaan, hal tersebut dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme.maka dari itu dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrat yan berintegritas, profesional, murah hati dan merakyat, karena selama ini stigma buruk pada birokrat sudah melekat di dalam pikiran masyarakat maka dari itu makn tujuan reformasi birokrasi adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja para birokrasi

### **Daftar Pustaka**

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

Akadun, "Good Governance" dalam *jurnal Sosiohumaniora* Vol. 9, No. 1, Tahun 2007, hal. 40

Muslimah . "mal administrasi dalam Tindakan pemerintah" (2021) : 2

Muslimah . "mal administrasi dalam Tindakan pemerintah" (2021) : 2Hafiez, afrizal . "peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah" (2021) : 5

*Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4, No. 1 (2020) - "Efektivitas Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia"

*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020) - "Dampak Buruk Maladministrasi Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia"

*Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 23, No. 4 (2019) - "Maladministrasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Dampaknya Terhadap Citra Negara di Indonesia"

Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. Penegakan Hukum, 3.

Indriastuti, I. (2020). Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 10(1), 60-75

Ghozali Puruhito. *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik*. Jurusan Ilmu

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. hal. 3-4. (Lihat Prasetyo, Eko dkk. Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2003. hlm. 18).

Ghozali Puruhito. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. hal. 3-4. (Lihat Prasetyo, Eko dkk. Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2003. hlm. 18).

Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetaka Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 183.